



## **RESPON ORGANISASI ISLAM TRANSNASIONAL DI INDONESIA TERHADAP PROGRAM DERADIKALISASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)**

*Mirza Dwiky Hermastuti*

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The issue of terrorism is increasingly become world's attention post 11 September 2001. One of the handling of the crime of terrorism is through the soft approach conducted with de-radicalization program. Indonesia's de-radicalization program conducted by BNPT obtained objections from Transnational Islamic Organizations in Indonesia. This research aims to find out the factors that influence the Transnational Islamic Organization's resistance towards de-radicalization program of BNPT viewed from social movements perspective. The research method is qualitative and the type of research is explanatory that explain the cause of rejections from Transnational Islamic Organizations towards the de-radicalization program BNPT. This research uses globalization theory by Holton and social movements theory by McCarthy and Zald. The results of this research indicate that the rejection's response to the de-radicalization BNPT is a form of backlash conscious by Transnational Islamic Organizations to oppose Western thought. Viewed from the perspective of social movements, framing, and resource mobilization strategies seen in the rejection's movements of the Transnational Islamic Organization. In addition the political opportunity structure in the reformation era makes the system and political structure existed became more open. It has provided an opportunity for Transnational Islamic Organization to conduct its movement in criticizing the government.*

**Keywords:** *de-radicalization, Transnational Islamic Organizations, backlash, globalization, social movements*

### **1. Pendahuluan**

Isu tentang Terorisme di dunia bukanlah suatu hal yang baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa *World Trade Center* (WTC) di New York Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Korban meninggal akibat serangan atas WTC mencapai lebih dari 2.600 orang sementara 125 orang meninggal di Pentagon dan 256

orang lainnya dalam 4 pesawat yang digunakan untuk menyerang sasaran (National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States:1-2).

Setelah peristiwa 9/11, seluruh perangkat pertahanan Amerika Serikat dikerahkan untuk memerangi terorisme internasional, salah satu upayanya yaitu melakukan kerjasama bilateral dengan banyak negara untuk bersama-sama memerangi terorisme. Hal ini menjadikan Amerika Serikat mendeklarasikan Gerakan Koalisi Dunia dalam memerangi terorisme atau *Global War on Terrorism* (GWOt) ([www.globalpolicy.org](http://www.globalpolicy.org)). Dalam rencana strategis keamanan militer Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat menjelaskan bahwa musuh utama dalam GWOt adalah pergerakan transnasional dari organisasi ekstremis, jaringan atau individu dan pendukungnya baik negara maupun non-negara yang memiliki kesamaan bahwa mereka memanfaatkan Islam dan menggunakan terorisme untuk tujuan ideologisnya (Department of Defense, 2006:13).

Kampanye anti-terorisme yang dilancarkan Bush melalui GWOt telah menjadikan Asia Tenggara sebagai "*second front*" setelah Afghanistan. Bahkan Indonesia dianggap sebagai "jantungnya" dalam upaya Amerika melawan terorisme di Asia Tenggara. Asia Tenggara menjadi target kampanye anti-terorisme oleh Amerika dan sekutu-sekutunya disebabkan oleh dua hal. Alasan pertama yaitu mayoritas penduduk di kawasan ini beragama Islam, yakni agama yang sama dipeluk oleh pimpinan kelompok Al-Qaeda, Osama Bin Laden, yang dituduh oleh pemerintah Amerika berada di balik serangan 11 September 2001 terhadap New York dan Washington D.C (Sukti, 2008:87-100).

Dalam menanggapi banyaknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bertanggungjawab terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia. Dalam menanggapi isu terorisme, pada awalnya pemerintah mengandalkan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan atau *hard approach*. Strategi ini telah dijalankan oleh Densus 88 dan berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di Indonesia. Namun, strategi ini ternyata tidak cukup karena menurut Ansyad Mbai, mantan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menyebutkan bahwa ideologi radikalisme merupakan akar dari terorisme yang memaksakan kehendak dan menyebabkan munculnya gerakan teror yang terus tumbuh di masyarakat ([www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), 31/10/2012).

Berbeda dengan Densus 88, BNPT dalam melaksanakan tugasnya cenderung menggunakan *soft approach*. *Soft approach* dalam penanganan terorisme di sini menggunakan pendekatan *hearts and minds* yang kemudian dapat dikategorikan sebagai bagian dari kegiatan antiterorisme yang berusaha menyelesaikan isu-isu yang dianggap sebagai akar masalah (*root causes*) dari munculnya komitmen orang atau sekelompok orang untuk melakukan aksi terorisme (Freedman,2002:40).

Sejak berdirinya BNPT pada tahun 2010, Program Deradikalisasi mendapat respon penolakan dari beberapa Organisasi Islam Transnasional yang ada di Indonesia, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Jama'ah Ansharusy Syariah (JAS). Organisasi Islam Transnasional ini merupakan hasil dari proses globalisasi. Rasa solidaritas mendorong mereka untuk melakukan gerakan di berbagai negara dengan tujuan yang sama. Organisasi Islam Transnasional memiliki visi dan misi perjuangan berbeda mulai dari yang konsen dengan aktivitas dakwah sampai yang konsen dengan perjuangan politik. Kemunculannya dimulai dari kebangkitan dan semangat juang para tokohnya atas penderitaan umat Islam di berbagai penjuru dunia oleh kolonialisme barat di negara-negara berpenduduk muslim. Pan Islamisme dan Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hizbut Tahrir di Libanon, Jama'ah Tabligh di India dan gerakan-gerakan Islam

lainnya terinspirasi oleh semangat dan perlawanan kaum lemah terhadap kekuatan kaum penindas barat yang telah menyebarkan imperialisme di negeri mereka (Wahid, 2009:2).

Pentingnya kajian mengenai Organisasi Islam Transnasional cukup beralasan karena gerakan keagamaan ini memberi fenomena baru dalam kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini. Gerakan tersebut menunjukkan lingkup yang tidak hanya terbatas pada wilayah nasional atau lokal seperti halnya organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang menganut paham Islam moderat, namun gerakan dan aktifitas dari kelompok ini telah melampaui sekat-sekat teritorial negara-bangsa (*nation-state*). Ideologi dari Organisasi Islam Transnasional yang cenderung fundamentalis, oleh BNPT dimasukkan ke dalam kelompok radikal yang ada di Indonesia dan dianggap mengancam keutuhan NKRI karena sebagian dari mereka ingin merubah sistem pemerintahan yang ada saat ini ([www.damailahindonesiaku.com](http://www.damailahindonesiaku.com)).

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas adalah respon penolakan Organisasi Islam Transnasional di Indonesia terhadap Program Deradikalisasi BNPT. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan penolakan yang dilakukan oleh Organisasi Islam Transnasional terhadap program Deradikalisasi BNPT. Secara khusus penelitian ini memberikan analisis tentang gerakan yang dilakukan oleh Organisasi Islam Transnasional dilihat dari sudut pandang *social movement*.

Teori yang digunakan adalah Teori Globalisasi dan Teori *Social Movement*. Teori Globalisasi dari kelompok polarisasi menjelaskan bahwa globalisasi telah menciptakan polar-polar atau kutub-kutub baru yang muncul sebagai kekuatan baru di dunia. Globalisasi akan menghadirkan kutub lawan yang tetap kukuh pada kultur asalnya. Bahwa globalisasi bukan berarti persamaan kultur dan budaya, ketika kultur dianggap sebagai suatu aspek kehidupan yang mandiri dan sukar untuk mengalami penyatuan (Holton, 2000). Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari Huntington (1996) bahwa pasca perang dingin konflik yang terjadi adalah konflik karena benturan peradaban atau yang disebut *The Clash of Civilization*. Tesis ini diharapkan dapat menjelaskan tentang *backlash* yang dilakukan oleh Organisasi Islam Transnasional. Sedangkan Teori *Social Movement* digunakan karena objek penelitian ini adalah gerakan sosial sehingga pendekatan ini dianggap paling tepat untuk dapat mengetahui alasan gerakan Organisasi Islam Transnasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif, yaitu mencoba menjelaskan hal yang menyebabkan respon penolakan Organisasi Islam Transnasional di Indonesia terhadap program deradikalisasi BNPT. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari pihak BNPT dan Organisasi Islam Transnasional.

## **2. Pembahasan**

Di era reformasi sistem politik Indonesia menjadi terbuka dan menjamin kebebasan individu maupun kelompok untuk berekspresi. Struktur politik tidak lagi dikuasai oleh pemilik tunggal namun mengalami disintegrasi ke dalam kutub-kutub politik yang lebih kecil (Amir, 2003: 6). Sebagai bukti pasca reformasi struktur politik yang terbuka telah memberikan kesempatan pada organisasi Islam untuk muncul ke permukaan. Saluran aspirasi dan perjuangan yang mereka bentuk mulai dari organisasi gerakan sosial hingga organisasi partai politik untuk mencapai tujuan mereka yaitu menegakkan syari'at Islam di Indonesia. Hasan (2008) mencatat fenomena reformasi menjadi momentum lahirnya

organisasi-organisasi massa dan banyak diantaranya berbasis Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Ansharusy Syariah dan lain sebagainya.

**Tabel 1.**  
**Peringkat Kebebasan Masyarakat dan Hak Politik di Indonesia**  
**Tahun 1997-2015**

Tahun	Index		Status
1997	PR	7	PF
	CL	5	
1998	PR	6	PF
	CL	4	
1999	PR	4	PF
	CL	4	
2000-2005	PR	3	PF
	CL	4	
2006-2013	PR	2	F
	CL	3	
2014	PR	2	PF
	CL	4	
2015	PR	2	PF
	CL	4	

Catatan : PR : *Political Right*, CL : *Civil Liberties*.

Nilai : 1-2,5 = Bebas, 3-5 = Cukup bebas, 5,5-7 = Tidak bebas.

F = *Free* , PF = *Partly Free*, NF= *Not Free*

Sumber : *Freedom House Index*, [www.freedomhouse.org](http://www.freedomhouse.org)

Dari tabel di atas dapat diartikan bahwa pada era Orde Baru kebebasan masyarakat dan hak-hak politik masyarakat masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan oleh sikap pemerintah yang cenderung menunjukkan represifitas terhadap masyarakat sebagai upaya *status quo*. Sedangkan dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa pada era Reformasi terjadi peningkatan *Civil Liberties* dan *Political Right*. Kebebasan masyarakat pada era Reformasi tersebut juga termasuk dengan terpenuhinya hak politik masyarakat untuk bebas berpolitik. Kebebasan berpolitik bagi masyarakat tersebut ditunjukkan dengan diberikannya kebebasan bagi setiap anggota masyarakat untuk berkumpul, berorganisasi dan menyampaikan pendapat mereka baik bentuk kritikan maupun dukungan kepada pemerintah.

**Tabel 2.**  
**Perbandingan *Political Opportunity Structure***  
**Pada Era Orde Baru dan Era Reformasi**

	Orde Baru	Orde Reformasi
Sistem Politik	Relatif tertutup	Relatif terbuka
Sirkulasi Elit	Format politik yang ada tidak mencerminkan sirkulasi elit yang kompetitif karena dibatasi oleh pemerintah	Format politiknya menunjukkan sirkulasi elit yang kompetitif melalui mekanisme seperti pemilu
Represifitas	Bersikap represif terhadap kritikan serta upaya mobilisasi politik. Aktifitas politik cenderung pasif yang ditunjukkan dengan sedikitnya organisasi, gerakan dan partai politik	Tidak represif terhadap kritikan kepada pemerintah. Adanya kebebasan kepada semua orang untuk berserikat, menyampaikan kritik atau membentuk organisasi, gerakan atau partai politik

Sumber : Hasil olahan penulis

Organisasi Islam Transnasional yang ada di Indonesia khususnya dalam penelitian ini HTI, MMI, dan JAS juga turut memanfaatkan kondisi kesempatan politik ini untuk mendeklarasikan gerakan mereka secara resmi kepada publik. Sebelumnya gerakan mereka bersifat *under ground* atau ‘bawah tanah’. Pada era reformasi ketiga organisasi tersebut memanfaatkan kesempatan politik yang telah terbuka dengan melakukan kegiatan ekspansi dan gerakan-gerakan untuk mencapai tujuannya. Mereka melalui berbagai media melakukan kegiatan tanpa adanya rasa takut terhadap upaya represif dari pemerintah. Sehingga dengan adanya *political opportunity structure* telah memberikan kesempatan kepada Organisasi Islam Transnasional untuk melakukan gerakan-gerakannya termasuk mengkritiki pemerintah.

Di samping itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa respon penolakan tersebut secara sadar dilakukan oleh Organisasi Islam Transnasional sebagai strategi melakukan *backlash*. *Backlash* muncul akibat dari globalisasi yang telah menciptakan kutub-kutub baru di dunia. Kutub baru tersebut muncul sebagai sebuah kekuatan baru selain kekuatan *west* yang disebut dengan *rest*. Pandangan atau pemikiran yang dibawa oleh *rest* pada kenyataannya bertolak belakang dengan *west*. Kemudian perbedaan pandangan diantara peradaban tersebut menyebabkan terjadinya benturan atau *backlash* diantara *west* dan *rest*.

Gerakan Islam Transnasional muncul sebagai *rest* dengan melakukan *backlash* terhadap kekuatan Barat. Secara khusus *backlash* dalam penelitian ini ditunjukkan dengan penolakan Organisasi Islam Transnasional terhadap upaya Barat dalam menangani kejahatan terorisme melalui program *Global War on Terrorism* (GWOt). Di Indonesia sendiri salah satu upaya GWOt dilakukan oleh BNPT melalui Program Deradikalisasi. Sehingga Organisasi Islam Transnasional di Indonesia mengasumsikan bahwa program deradikalisasi BNPT merupakan bagian dari Barat.

Analisis dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa *backlash* dari Organisasi Islam Transnasional tersebut dapat dilihat dari strategi *framing* dan *resource mobilization* yang mereka lakukan. Persepsi 'we' vs 'the others' muncul diantara BNPT dan Organisasi Islam Transnasional di Indonesia. Persepsi tentang 'if you are not with us you are against us' menjadi dasar dari Organisasi Islam Transnasional untuk membuat wacana-wacana tandingan yang dengan sengaja dibuat untuk melawan ancaman dari BNPT yang memiliki legitimasi.

Dalam penelitian ini *framing* ditunjukkan dengan opini-opini yang dibangun oleh ketiga Organisasi Islam Transnasional bahwa program deradikalisasi dalam pelaksanaannya bersikap deskriminatif terhadap umat Islam. Program deradikalisasi dianggap sebagai salah satu upaya deislamisasi. Hal tersebut menurut mereka adalah suatu ancaman bagi seluruh umat Islam. Sehingga umat Islam harus bersama-sama melawan program deradikalisasi BNPT tersebut.

Selain itu menurut mereka program deradikalisasi BNPT merupakan bentuk upaya Barat untuk meredam perkembangan Islam dengan cara mendukung berkembangannya Islam Moderat. Organisasi Islam Transnasional dalam penelitian ini juga memberikan *framing* untuk solusi dari permasalahan yang ada yaitu dengan menggunakan syari'at Islam dan membangkitkan kembali sistem *khilafah*. Hal ini karena menurut hasil penelitian diketahui bahwa akar dari permasalahan yang ditentang oleh ketiga Organisasi Islam Transnasional tersebut adalah sistem atau aturan yang tidak berdasarkan syari'at Islam atau pemikiran Barat.

*Resources* (Sumber Daya) adalah bagian paling penting dalam sebuah gerakan sosial. Semua gerakan sosial membutuhkan sumber daya untuk dapat melakukan aktifitasnya. Walaupun dengan terbukanya kesempatan politik, aktifitas sebuah gerakan tidak akan dapat berjalan ketika tidak ada sumber daya yang dapat dimobilisasi oleh gerakan. Dan semenarik apa pun pengemasan ideologi gerakan tidak akan dapat mencapai tujuan tanpa adanya sumber daya untuk dimobilisasi.

Sumber daya dapat diartikan dalam makna yang luas. Sumber daya dapat terdiri dari kekuatan finansial, akses terhadap media, dukungan dari simpatisan dan loyalitas grup. Atau sumber daya juga dapat terdiri dari kepemilikan ruang atau gedung, pengetahuan (*Stock of Knowledge*), dan keahlian (*skill*), termasuk juga nilai dan ideologi yang dimiliki oleh aktor (Opp, 2009:139). Akan tetapi secara umum sumber daya adalah segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat (*utility*), baik yang dimiliki individu atau pun kelompok, yang dapat dikontrol, dikuasai dan dimanfaatkan secara kolektif untuk mencapai tujuan dari gerakan sosial tersebut (Opp 2009; Tilly 1987).

Demikian pula yang terjadi pada gerakan Organisasi Islam Transnasional di Indonesia. Meskipun struktur dan sistem politik telah memberikan ruang bagi Organisasi Islam Transnasional untuk melakukan gerakan di era reformasi ini, keadaan tersebut tidak begitu saja dapat dimanfaatkan. Organisasi Islam Transnasional tersebut membutuhkan sumber daya untuk dimobilisasi agar dapat melakukan aktifitas dalam mencapai tujuannya termasuk dalam upaya penolakan deradikalisasi BNPT.

Pemimpin (*leaders*) dalam suatu Organisasi Gerakan Sosial memiliki resiko dan tanggung jawab yang lebih besar daripada para anggotanya, namun mereka juga akan menerima keuntungan yang lebih besar atas keberhasilan suatu gerakan sosial. Pemimpin biasanya akan mendapatkan keuntungan dalam hal status dan wewenang, kadang-kadang juga dalam hal kekayaan, atas posisinya dalam suatu Organisasi Gerakan Sosial. Menurut Morris dan Staggenborg dalam Snow, Soule, & Kriesi (2004) menyatakan bahwa para

pemimpin (*leaders*) sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesempatan-kesempatan, menyusun strategi, membingkai tuntutan-tuntutan, dan mempengaruhi hasil-hasil. Pemimpin gerakan (*leaders movement*) didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis (*strategic decision-makers*) yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial.

### 3. Kesimpulan

Program deradikalisasi BNPT merupakan salah satu upaya *soft approach* yang dilakukan pemerintah dalam menangani tindakan terorisme. Dalam pengimplementasian program deradikalisasi BNPT tersebut muncul respon penolakan dari beberapa Organisasi Islam Transnasional yang ada di Indonesia. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan alasan dari respon penolakan yang dilakukan oleh HTI, MMI dan JAS sebagai Organisasi Islam Transnasional di Indonesia terhadap program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya penolakan dari ketiga Organisasi Islam Transnasional terhadap program deradikalisasi BNPT disebabkan oleh adanya *Political Opportunity Structure* pada era Reformasi. Gerakan penolakan tersebut tidak terlepas dari adanya peningkatan kebebasan masyarakat dan hak politik yang diperoleh setiap individu. Hal ini dibuktikan dengan *Freedom Index* yang menunjukkan adanya peningkatan kebebasan masyarakat dan hak politik pada era Reformasi jika dibandingkan dengan era Orde Baru.

Pada era Reformasi Organisasi Islam Transnasional dengan bebas menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan ideologinya secara bebas kepada masyarakat. Respon penolakan yang dilakukan oleh Organisasi Islam Transnasional melalui berbagai media dapat terjadi akibat adanya *political opportunity structure*. Faktor *political opportunity structure* ini dimanfaatkan oleh Organisasi Islam Transnasional sebagai sebuah *social movements* untuk melakukan delegitimasi terhadap pemerintah.

Respon penolakan Organisasi Islam Transnasional terhadap program deradikalisasi BNPT dikarenakan ketiga organisasi dalam penelitian ini ingin menjadikan isu deradikalisasi sebagai salah satu upaya untuk mendelegitimasi pemerintah. Dengan adanya isu deradikalisasi justru menguntungkan bagi Organisasi Islam Transnasional tersebut untuk membuat *framing* berkaitan dengan isu tersebut dan menjadikannya 'senjata' mereka untuk menyerang pihak pemerintah. Penolakan terhadap deradikalisasi menjadi alat yang digunakan Organisasi Islam Transnasional untuk menunjukkan kerusakan sistem atau kesalahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia secara khusus dan sistem sekuler secara umum.

Sesuai dengan pernyataan dari Benford dan Snow (2000: 614-615), Organisasi Islam Transnasional ini dalam gerakannya cenderung memposisikan diri mereka sebagai '*victim*' atau dalam bahasa yang mudah dipahami, terbelakang, mengalami kemunduran, mengalami ketidakadilan sehingga dibutuhkan adanya suatu perubahan. Hal inilah yang dimunculkan oleh ketiga Organisasi Islam Transnasional dalam isu deradikalisasi BNPT.

Ciri dari gerakan yang dilakukan oleh HTI ialah konsentrasinya yang sangat besar kepada aspek keilmuan dan menjadikannya sebagai landasan pembentukan pribadi muslim dan umat Islam. Selain itu, Hizbut Tahrir berupaya keras mengembalikan kepercayaan terhadap Islam melalui aktivitas keilmuan disatu sisi dan melalui jalur politik disisi lain. Melalui aktivitas politik strategi dilakukan dengan cara merekam dan menginventarisasi

segala kejadian dan peristiwa. Kemudian hal tersebut dijadikannya bahan pembicaraan yang mengacu kepada kebenaran pemikiran dan hukum-hukum Islam dalam rangka meraih kepercayaan masa.

Sedangkan MMI dan JAS memiliki dasar pemikiran yang erat kaitannya dengan keinginan sebagian umat Islam untuk mendirikan Negara Islam (*Daulah Islamiyah* atau *Islamic State*). Kedua kelompok ini berpendapat bahwa Islam sesungguhnya adalah *din wa daulah* (Agama dan Negara), pendirian Negara Islam menjadi sebuah keniscayaan. Selain itu, upaya penegakan syariat Islam itu merupakan tujuan akhir dari pergerakan ini. Penegakan syariat Islam secara formal melalui institusi Negara merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. Disisi lain, MMI dan JAS masih percaya bahwa upaya penegakan syariat Islam dapat diperjuangkan di Indonesia dengan mengakomodir bentuk Negara Republik Indonesia.

Kemudian Organisasi Islam Transnasional dalam penolakannya tersebut juga membuat *framing* bahwa solusi yang tepat untuk seluruh permasalahan yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia adalah dengan mendirikan kembali *khilafah* dan menerapkan syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam mengatur negara.

Mendirikan kembali *khilafah* dan menerapkan syari'at Islam merupakan bagian dari cita-cita perjuangan gerakan-gerakan tersebut. saat ini menurut mereka negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, termasuk di Indonesia tidak sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu mereka berjuang untuk merubahnya agar sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu, mereka memandang kebijakan luar negeri negara-negara Barat, yang kini dipimpin Amerika Serikat, khususnya dalam program demokratisasi dan kampanye hak asasi manusia (HAM) dalam penerapannya mempunyai 'standar ganda' sehingga melahirkan ketidakadilan global khususnya kepada umat Islam.

Sehingga dari semua penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa penolakan-penolakan yang dilakukan oleh Organisasi Islam Transnasional di tingkat global memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melakukan perlawanan terhadap hegemoni Barat terhadap Islam. Penolakan tersebut secara sadar dilakukan dengan menggunakan strategi-strategi yang biasa digunakan oleh sebuah *social movements* yaitu *political opportunity structure*, *framing* dan *resource mobilization*.

Selain itu dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendefinisian deradikalisasi di antara Organisasi Islam Transnasional di Indonesia dan BNPT. Perbedaan pendefinisian deradikalisasi ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya respon penolakan Organisasi Islam Transnasional di Indonesia terhadap program deradikalisasi BNPT.

#### **Daftar Pustaka**

- Anonim. War on Terrorism. (online). Tersedia: <https://www.globalpolicy.org/war-on-terrorism.html> [20 Desember 2014].
- Amir, Zainal Abidin. 2003. *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Benford, Robert dan Snow, David. 2000. "Framing Process and Social Movements: An Overview and Assesment" dalam *Annual Review of Sociology* 26 , pp. 611—639.
- BNPT. (2013, 2 Juli). Deradikalisasi Terorisme. (online). Tersedia: <http://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi-terorisme-2.html> [21 Desember 2014]



- Freedman, Lawrence. 2002. "The Coming War on Terrorism". *The Political Quarterly Publishing Issues Supplement s1, Vol.73. Agustus 2002.* pp 40-56.
- Freedom House. 2015. *Freedom in the World : Country Rankings 1972-2015.*
- Hasan, Noorhaidi. 2008. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde-Baru.* Jakarta: LP3ES
- Holton, Robert. 2000. "Globalization's Cultural Consequences". *Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 570. Juli 2000.* pp. 140-152. Sage Publication, Inc.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.* New York, NY: Simon and Schuster.
- Kriesi, Hanspeter. 2004. "Political Context and Opportunity" pp. 68-90 dalam *The Blackwell Companion to Social Movements.* Editor oleh Snow, D. A., S.A Soule, dan H. Kriesi. Massachusetts: Blackwell Publishing.
- Opp, Karl Dieter. 2009. *Theories of Political Protest and Social Movements: a Multidisciplinary introduction, Critique, and Synthesis.* London: Routledge.
- Sukti, Surya. 2008. *Islam dan Terorisme di Asia Tenggara.* Jurnal: Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 5, No.1.
- Syafputri, Ella. (2012, 31 Oktober). BNPT: Radikalisme Akar Terorisme. (online). Tersedia: <http://www.antaraneews.com/berita/341443/bnptradikalisme-akar-terorisme> [20 Desember 2014].
- The 9/11 Commission Report : Final Report of The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. (online). Tersedia: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-911REPORT/pdf/GPO-911REPORT-24.pdf> [20 Desember 2014].
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution.* London: Addison-Wesley Publishing.
- Wahid, KH. Abdurrahman. 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia.* Jakarta: The Wahid Institute.